

# DIALEKTIKA KONSEP *DYNAMIC GOVERNANCE*

Mudiyati Rahmatunnisa<sup>1</sup>

*Behind Singapore's success: "a willingness to work hard,  
make changes and adapt to the world as it is and not as we wish it to be."  
" Prime Minister Lee Hsien Loong*

## Abstrak

Era milenial telah berkonsekuensi pada lahirnya berbagai perubahan yang begitu cepat. Pada gilirannya, Pemerintah dituntut untuk mampu beradaptasi dan merespon perubahan tersebut agar mampu memfasilitasi kesejahteraan dan pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Dalam konteks inilah pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance*) menjadi sentral dalam menjawab tantangan yang dihadapi oleh pemerintah saat ini. Apa yang dimaksud dengan konsep *dynamic governance*? Mengapa konsep ini penting? Bagaimana prakteknya yang efektif? Artikel ini akan mencoba mendiskusikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut.

**Kata Kunci:** *government, governance, good governance, dynamic governance*

## Abstract

*Millennial era has a consequence of the birth of various changes that are so fast. In turn, the Government is required to be able to adapt and respond to these changes in order to be able to facilitate prosperity and sustainable economic development. It is in this context that dynamic governance becomes central in responding to the challenges faced by the current government. What is the concept of dynamic governance? Why is this concept important? How to practice it effectively? This article will try to discuss the answers to these questions.*

*Keywords: government, governance, good governance, dynamic governance*

## PENDAHULUAN

Konsep *dynamic governance* telah menjadi sangat populer di era milenial yang sangat cepat mengalami perubahan di berbagai bidang kehidupan, tidak terkecuali penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat dari perkembangan yang begitu pesat dari teknologi informasi. Namun, hal mendasar terhadap penyelenggaraan pemerintahan tidak pernah beranjak dari tuntutan prosesnya

---

<sup>1</sup> Dosen pada Departemen Ilmu Politik, FISIP, Universitas Padjadjaran; alumnus The University of Western Australia. Email: m.rahmatunnisa@unpad.ac.id

yang harus efektif dan efisien. Era milenial dengan ditandai dengan perubahan yang begitu cepat pada akhirnya mengubah fokus mewujudkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan tidak hanya dilihat dari kemampuan pemerintah untuk merumuskan, melaksanakan dan mengontrol berbagai kebijakannya semata. Kompleksitas permasalahan yang dihadapi oleh setiap pemerintahan dari berbagai Negara dewasa ini, mengindikasikan bahwa *good government* dan *good policies* saja tidak cukup. Lebih dari itu, tantangan era milenial yang paling penting adalah “*dynamic, cut across many decisions, involve the need for continuous learning, and rest on effective and rapid implementation* (Porter, dalam Neo & Chen, 2007, p. viii). Oleh karena itu, yang dibutuhkan adalah pemerintahan yang mampu menjawab tantangan itu. Dalam konteks inilah, konsep *dynamic governance* menjadi tren saat ini sebagai sebuah jawaban jitu atas tantangan yang dihadapi oleh pemerintah di berbagai Negara. Neo dan Chen (2007) dalam bukunya yang *seminal* meyakini bahwa *dynamic governance*-lah yang menjadi kunci sukses Pemerintah Singapura saat ini.

Apa yang dimaksud dengan konsep *dynamic governance*? Mengapa konsep ini penting? Bagaimana prakteknya yang efektif? Artikel ini akan mencoba mendiskusikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Masing-masing pertanyaan akan menjadi sub judul dalam artikel ini. Tulisan ini akan diakhiri dengan simpulan singkat terkait konsep *dynamic governance* sebagai sebuah kemampuan yang wajib dimiliki oleh Pemerintah agar dapat menyelenggarakan berbagai fungsinya secara efektif dan efisien.

## **PEMBAHASAN**

### **Makna *Dynamic Governance***

Dinamisme (*dynamism*) pada hakekatnya merujuk pada kondisi adanya berbagai idea baru, persepsi baru, perbaikan secara terus-menerus, respon yang cepat, penyesuaian secara fleksibel dan inovasi-inovasi yang kreatif (Neo & Chen, 2007, p. 1). Dengan kata lain, dinamisme atau kondisi yang dinamis itu menggambarkan proses belajar yang tiada henti, cepat dan efektif, serta perubahan yang tiada akhir. Ketika kondisi dinamis itu menyangkut lembaga pemerintah,

maka kondisi yang dinamis menyangkut proses lembaga yang secara konstan atau konsisten melakukan perbaikan dan penyesuaian terhadap lingkungan sosial-ekonomi di mana masyarakat, swasta dan pemerintah berinteraksi. Lembaga pemerintah yang dinamis ini mempengaruhi proses pembangunan ekonomi yang tengah berjalan dan beragam perilaku sosial melalui kebijakan-kebijakan, aturan-aturan dan struktur-struktur yang menciptakan insentif dan sekaligus pembatasan-pembatasan untuk beragam aktivitas yang berlangsung. Pada gilirannya, kemampuan ini akan dapat menopang dan memperkuat pembangunan dan kesejahteraan Negara (Neo & Chen, 2007, p. 1).

Sementara itu, konsep *governance* telah diartikan sangat beragam oleh para ahli. Bahkan keberagaman pemaknaan konsep tersebut telah mengakibatkan konsep *governance* termasuk ke dalam kelompok konsep yang tidak terdefinisi secara jelas, seperti dikemukakan oleh Pierre dan Peters (2000: 7, dalam Chhotray & Stoker, 2009) bahwa konsep *governance* merupakan konsep yang “*notoriously slippery*”. Namun demikian, Schneider mengatakan bahwa ketidakjelasan tersebut justru menjadi “[*the*] *secret of its success*” sehingga menjadi sebuah konsep yang mengglobal. Dalam pengertiannya yang paling sederhana, Crook dan Manor (1995, dalam Rahmatunnisa, 2010, p. 1) mengatakan bahwa *governance* dimaknai sebagai “*ways of governing*”. Secara substantif, Chhotray dan Stokker (2009, p. 3) memaknai *governance* sebagai “*the rules of collective decision-making in settings where there are a plurality of actors or organizations and where no formal control system can dictate the terms of the relationship between these actors and organizations*”. Definisi ini memberikan catatan penting terkait empat hal yang menjadi prinsip atau elemen dasar dari konsep *governance*. Yang pertama terkait “*the rules*”, di mana yang dimaksud adalah beragam aturan baik formal maupun informal seperti konvensi dan kebiasaan lainnya (*customs*) dalam proses pengambilan keputusan (*what to decide, how to decide, and who shall decide*). Elemen yang kedua terkait makna “*collective*”, dimana beragam keputusan dibuat oleh “*a collection of individuals*”, yang melibatkan “*issues of mutual influence and control*”. Ketiga, menyangkut makna “*decision-making*”, dimana dalam konsep *governance* proses memutuskan sesuatu secara kolektif

dapat dilakukan baik untuk skala yang besar menyangkut masyarakat luata, atau berskala kecil menyangkut proses internal organisasi. *Keempat*, menyangkut makna “*no formal control system can dictate*” yang merujuk pada kondisi dimana governance menekankan pada *collective governing*, bukan *monocratic government*.

Pemaknaan serupa juga dikemukakan oleh Bhatta (2005, p. 252), yang menyatakan bahwa *governance* merupakan “*the relationship between governments and citizens that enable public policies and programs to be formulated, implemented and evaluated. In the broader context, it refers to the rules, institutions, and networks that determine how a country or an organization functions.*” Pemaknaan Bhatta tersebut secara substantif juga mengandung elemen-elemen kunci sebagaimana dimaksudkan oleh Chhotray dan Stokker.

Dari kedua konsep tersebut – dinamis dan *governance* – Neo dan Chen (2007, p. 7) mengatakan bahwa *governance* menjadi dinamis manakala pilihan-pilihan kebijakan dapat diadaptasikan dengan perkembangan terkini dalam lingkungan yang tidak pasti dan berubah sangat cepat sehingga berbagai kebijakan dan lembaga pemerintah tetap relevan dan efektif dalam mencapai tujuan jangka panjangnya. Adaptasi ini lebih dari sekedar membuat perubahan sekali saja (*one-time change*) atau proses *recovery* dari sebuah kegagalan. Lebih dari itu, dinamis lebih bermakna sebagai “*on-going sustained change for long-term survival and prosperity.*”

Dalam konteks tersebut, konsep *good governance* menjadi elemen strategis lainnya yang tidak terpisahkan. Pentingnya memiliki dan mempraktekkan *good governance* dan lembaga-lembaga pemerintah yang jujur dan kompeten menjadi syarat penting untuk kemajuan ekonomi dan penguatan kesejahteraan masyarakat. Argumentasi ini dikemukakan secara tegas oleh Daniel Kaufmann, Direktur *Global Governance* dari Bank Dunia, bahwa “*Poorly functioning public sector institutions and weak governance are major constraints to growth and equitable development in many developing countries.*” (dikutip dalam Neo & Chen, 2007, p. 7). Namun demikian, Neo dan Chen (2007, pp. 7–8) berpendapat bahwa sekedar mempraktekkan *good governance* saja tidaklah cukup untuk

mencapai proses pembangunan yang berkelanjutan dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Bangunan *governance* yang dibuat pada kurun waktu tertentu, dapat menjadi tidak berfungsi ketika lingkungan berubah. Untuk bisa relevan dan efektif, praktek *good governance* perlu dinamis.

*Governance* yang dinamis memerlukan proses pembelajaran yang terus-menerus, untuk memperoleh pemahaman yang mendalam tentang masa depan yang dapat mempengaruhi Negara, kesediaan untuk meninjau beragam kebijakan yang kadaluarsa karena perubahan keadaan, dan keterbukaan untuk beradaptasi dengan pengetahuan global yang disesuaikan dengan konteks unik Negara. Oleh karena itu, *dynamic governance* dapat dimaknai sebagai “*the ability of government to continually adjust its public policies and programs, as well as change the way they are formulated and implemented, so that the long-term interests of the nations are achieved.*”

### **Manfaat *Dynamic Governance***

Saat ini, semua Negara di dunia menghadapi lingkungan yang penuh dengan ketidakpastian dan perubahan yang begitu cepat dan sulit diprediksi. Kemajuan yang diraih sekarang, tidak menjamin keberlangsungan hidup di masa depan. Bisa jadi, seperangkat prinsip, kebijakan dan praktek-praktek yang pada awalnya baik, *governance* yang statis dan mempertahankan *status quo* pada akhirnya akan membawa keadaan yang stagnan dan tidak berkembang. Tidak ada perencanaan yang hati-hati akan menjamin relevansi dan efektivitas *governance*, jika lembaga-lembaga pemerintahan tidak memiliki kapasitas untuk belajar, berinovasi dan berubah di tengah lingkungan global yang terus berubah dan sulit diprediksi (Neo & Chen, 2007, p. 1).

Tantangan lain yang dihadapi dunia saat ini adalah inovasi teknologi yang berjalan begitu cepat, telah mengakibatkan banyak kebijakan menjadi cepat usang (*obsolescence*) dan terbukanya peluang-peluang baru. Demikian halnya dengan kondisi perubahan di masyarakat itu sendiri, di mana semakin banyak dari mereka yang mengenyam pendidikan yang lebih baik (*well-educated*) dan berinteraksi secara intensif dengan perkembangan global, yang pada akhirnya menuntut untuk

terlibat di dalam proses perumusan dan implementasi berbagai kebijakan Negara. Tidak kalah penting adalah berbagai permasalahan di masyarakat yang semakin kompleks, dengan dampaknya yang semakin tidak terduga serta hubungan kausal yang semakin rumit, membutuhkan penyelesaian yang multi-perspektif dan koordinasi dari *multi-agency* (Neo, 2019; Neo & Chen, 2007, pp. 6–8).

Dengan merujuk pengalaman Negara Singapura, Neo dan Chen meyakini bahwa untuk menghadapi beragam tantangan tersebut, Pemerintah menjadi elemen sentral. Pemerintah lewat lembaga-lembaganya memainkan peran dalam menciptakan kerangka hubungan antara pemerintah, masyarakat dan dunia bisnis, serta kondisi untuk dapat memfasilitasi atau sebaliknya, menghambat keberlanjutan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Meski Pemerintah tidak secara langsung menciptakan persaingan industri, namun dapat berperan sebagai “*a catalyst and a challenger in shaping the context and institutional structure that stimulates business to gain competitive advantages.*” (Neo & Chen, 2007, pp. 2–3). Di sinilah perlunya dinamisme Pemerintah. Pemerintah melalui lembaga-lembaganya yang dinamis menurut Neo dan Chen (2007, p. 1), “*can enhance the development and prosperity of a country by constantly improving and adapting the socio-economic environment in which people, business and government interact.*” Pemerintah dapat mempengaruhi dan mengendalikan pembangunan ekonomi melalui beragam kebijakan, peraturan dan struktur-struktur kelembagaan yang memberikan insentif atau pembatasan atas beragam aktivitas yang beejalan. Dengan kata lain, kemampuan untuk memperbaiki dan beradaptasi secara terus-menerus merupakan kapasitas mendasar yang perlu dimiliki oleh Pemerintah (baca: lembaga-lembaga Pemerintah) jika ingin memiliki *sustained economic development and prosperity*.

### **Tantangan Dalam Praktek *Dynamic Governance***

Apakah mungkin Pemerintah bisa dinamis? Ini adalah pertanyaan yang sangat mendasar dan pada intinya mengungkap kontradiksi makna *dynamic governance* itu sendiri (*oxymoron*). Gambaran tentang Pemerintah pada umumnya sangat jauh dari perspektif dinamis. Sebaliknya, Pemerintah – khususnya birokrasi

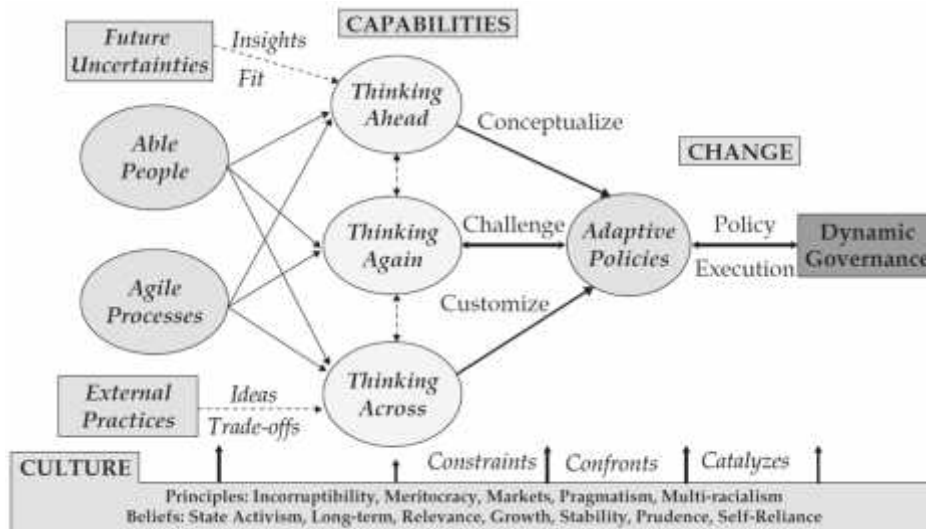
pemerintah – seringkali dipahami sebagai entitas yang lambat, birokrasi yang ketinggalan jaman, kaku dan tidak memiliki perhatian baik terhadap kepentingan dan kebutuhan individu maupun bisnis (Neo & Chen, 2007, p. 1). Kondisi ini bertolak belakang sekali dengan makna dinamis sebagaimana diuraikan pada bagian sebelumnya, yang dicirikan oleh ide-ide baru, persepsi-persepsi yang kekinian, upaya perbaikan yang terus-menerus, tindakan yang cepat dan responsif, daya adaptasi yang fleksibel, cepat dan eksekusi tindakan yang efektif, serta perubahan yang terus-menerus.

Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa lembaga pemerintah dapat menjadi dinamis melalui pemanfaatan landasan nilai dan keyakinan budaya yang bersinergi dengan kapabilitas organisasi yang kuat untuk menciptakan *dynamic governance system* yang memungkinkan perubahan yang terus-menerus. Sinergi kedua aspek tersebut menjadi hal yang sangat penting. Dijelaskan oleh Neo dan Chen (2007, p. 3) bahwa

*Institutional culture can support or hinder, facilitate or impede dynamism in policy-making and implementation. Institutional culture involves how a nation perceives its position in the world, how it articulates its purpose, and how it evolves the values, beliefs and principles to guide its decision-making and policy choices. In addition, strong organizational capabilities are needed to consider thoroughly major policy issues and take effective action.*

*Dynamic governance* sebagai output dari sinergi kedua elemen tersebut perwujudannya sangat bergantung pada upaya pemimpin untuk menata interaksi sosial dan ekonomi untuk mencapai tujuan nasional yang dicita-citakan. Dengan mengutip pendapat North, Neo dan Chen (2007, p. 12) mengatakan bahwa pembangunan ekonomi dan sosial yang berkelanjutan hanya akan terjadi manakala terdapat “*leadership intention, cognition and learning which involve continual modification of perceptions, belief structures and mental models, particularly when confronted with global development and technological change.*” Oleh karenanya, dua hambatan utama untuk terwujudnya *dynamic governance* adalah ketidakmampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan dan untuk melakukan penyesuaian atas kelembagaan yang dibutuhkan agar tetap efektif.

Bagaimana sesungguhnya interaksi berbagai elemen dalam mewujudkan dynamic governance? Gambar 1 menunjukkan kerangka untuk *dynamic governance* dengan keterkaitan antar elemennya.



Gambar 1 Kerangka *Dynamic Governance System* (Neo & Chen, 2007, p. 13)

*Dynamic governance* yang merupakan *outcome* yang diharapkan, terwujud manakala kebijakan-kebijakan yang adaptif (*adaptive policies*) dilaksanakan. Adaptasi atas kebijakan ini tidak dilakukan secara pasif, akan tetapi proaktif melalui berbagai inovasi, kontekstualisasi dan implementasi. Adapun yang menjadi dasar dari proses menghasilkan *dynamic governance* adalah landasan nilai budaya (*institutional culture*) yang dimiliki oleh bangsa. Nilai budaya ini pada gilirannya akan mempengaruhi perilaku. Tiga kapabilitas dinamis, yakni *thinking ahead*, *thinking again*, dan *thinking across* yang memfasilitasi kebijakan-kebijakan adaptif. Kapabilitas ini harus tertanam dan termanifestasi dalam strategi dan proses kebijakan (membuat pilihan kebijakan, implementasi dan evaluasi) dari lembaga-lembaga pemerintah sehingga mereka senantiasa terus belajar, berinovasi dan beradaptasi dengan perubahan.

Kapabilitas *think ahead* pada prinsipnya merupakan kemampuan untuk mengidentifikasi perkembangan lingkungan, memahami konsekuensinya di masa datang terhadap tujuan ekonomi dan sosial, dan mengidentifikasi strategi investasi dan pilihan yang tepat sehingga memungkinkan semua elemen masyarakat dapat

mengeksplorasi berbagai kesempatan baru dan mampu mengatasi berbagai potensi ancaman. Proses melakukan *thinking ahead* melibatkan:

- a) mengeksplorasi dan mengantisipasi tren dan perkembangan masa depan yang memiliki dampak signifikan terhadap sasaran kebijakan,
- b) memahami bagaimana perkembangan ini akan mempengaruhi pencapaian tujuan saat ini, dan menguji keefektifan strategi, kebijakan dan program yang ada,
- c) menyusun strategi opsi apa yang dapat digunakan untuk menghadapi ancaman yang muncul dan mengeksploitasi peluang baru, dan
- d) mempengaruhi pengambil keputusan utama dan pemangku kepentingan untuk dipertimbangkan isu-isu yang muncul dan melibatkan mereka dalam percakapan strategis tentang respon yang akan dilakukan (Neo & Chen, 2007, pp. 32–33).

Kapabilitas *think again* menyangkut kemampuan untuk menilai kinerja strategi, kebijakan dan program yang ada, untuk kemudian di desain kembali untuk mencapai hasil yang lebih baik. Proses melakukan *thinking again* melibatkan:

- a) meninjau dan menganalisis data kinerja aktual dan memahami umpan balik dari publik,
- b) menyelidiki penyebab yang mendasari umpan balik atau fakta yang diamati, informasi dan perilaku, baik untuk memenuhi atau mengetahui target yang hilang,
- c) meninjau kembali strategi, kebijakan, dan program untuk diidentifikasi karakter dan aktivitas yang berfungsi dengan baik maupun yang tidak,
- d) mendesain ulang kebijakan dan program, sebagian atau seluruhnya, sehingga kinerja mereka dapat ditingkatkan dan tujuan tercapai, dan
- e) menerapkan kebijakan dan sistem baru sehingga warga dilayani dengan lebih baik dan menikmati hasil yang berarti (Neo & Chen, 2007, p. 37).

Kapabilitas *think across* adalah kemampuan untuk belajar dari pengalaman pihak lain, sehingga ide-ide bagus dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kondisi

internal agar tujuan dapat tercaai lebih baik. Kapabilitas *think across* melibatkan proses:

- a) mencari praktik-praktik baru dan menarik yang diadopsi dan diimplementasikan oleh orang lain dalam mendekati masalah yang serupa,
- b) merefleksikan apa yang mereka lakukan, mengapa dan bagaimana mereka melakukannya, dan pelajaran yang mereka pelajari dari pengalaman,
- c) mengevaluasi apa yang mungkin berlaku untuk konteks lokal, mempertimbangkan kondisi dan keadaan unik, dan apa akan diterima oleh penduduk setempat,
- d) menemukan hubungan baru antar ide dan kombinasi baru ide-ide berbeda yang menciptakan pendekatan inovatif untuk masalah yang muncul, dan
- e) menyesuaikan kebijakan dan program agar sesuai dengan persyaratan kebijakan local dan kebutuhan warga negara (Neo & Chen, 2007, pp. 41–42).

Untuk dapat memiliki kapabilitas *dynamic governance*, terdapat dua pilar utama, yakni sumberdaya manusia yang mampu dan proses yang gesit dan responsif. *Governance system* sangat dipengaruhi oleh lingkungan eksternal melalui ketidakpastian masa depan dan juga berbagai praktek yang dilakukan oleh Negara lain (Neo & Chen, 2007, p. 13).

*Dynamic governance* tercapai melalui berbagai kebijakan yang diadaptasi secara terus-menerus terhadap perubahan yang terjadi di lingkungan sekitar. Adaptasi kebijakan (*policy adaptation*) bukan merupakan reaksi pasif terhadap tekanan yang datang dari luar, tetapi merupakan tindakan proaktif melalui inovasi dengan ide-ide baru yang diinputkan ke dalam berbagai kebijakan untuk hasil yang lebih baik; kontekstualisasi ide-ide baru tersebut agar mendapat dukungan dari masyarakat; dan implementasi atau eksekusi kebijakannya sebagai manifestasi dari *dynamic governance* (Neo & Chen, 2007, p. 13).

Nilai-nilai kearifan lokal – nilai budaya, kepercayaan, tata kelembagaan dan kebiasaan – akan mempengaruhi perilaku. Kearifan lokal ini termanifestasi dalam norma-norma dan konvensi informal. Pada gilirannya, akan memainkan peran penting dalam proses perubahan dan adaptasi berbagai kebijakan.

Pengalaman Singapura menunjukkan bahwa asumsi mengenai keutamaan pertumbuhan ekonomi, kebutuhan terhadap pentingnya relevansi global dan peran penting Negara dalam menciptakan kondisi untuk pertumbuhan, mempengaruhi pemikiran dan pendekatan terhadap pemerintahan. Pilihan kebijakan yang dibuat dibentuk oleh nilai-nilai budaya tentang integritas, meritokrasi, kemandirian, pragmatism, dan kehati-hatian pengelolaan keuangan (Neo & Chen, 2007, p. 14). Dalam mewujudkan *dynamic governance*, peran pemimpin menjadi sangat penting. Dalam melakukannya, tidak hanya sekedar mengandalkan charisma dan upayanya sendiri saja, akan tetapi dengan membangun kapabilitas organisasi sehingga pengetahuan dan sumberdaya dapat secara sistematis dimanfaatkan untuk memecahkan berbagai permasalahan (*effective action*). Yang dibutuhkan untuk mewujudkan *dynamic governance* adalah proses belajar dan berpikir yang baru, desain beragam pilihan kebijakan, pengambilan keputusan yang analitis, seleksi rasional atas pilihan kebijakan, dan efektif implementasi kebijakan. Disinilah peran pemimpin menjadi sangat penting. Yang dibutuhkan adalah pemimpin yang berpikir kreatif dan inovatif serta bekerja keras untuk memberikan setting yang tepat untuk mewujudkan *dynamic governance* (Neo & Chen, 2007, p. 14). Upaya memperbaiki kinerja lembaga perlu diinisiasi oleh pemimpin organisasi. Untuk dapat mengambil keputusan dan pilihan yang tepat membutuhkan pemimpin organisasi yang memiliki “*necessary motivation, attitude, values, intellect, knowledge and skills to envision the future, develop strategic options and select paths that give the institution the greatest scope for survival and success.*” (Neo & Chen, 2007, p. 16).

*Dynamic governance* merupakan hasil dari niat kuat dan ambisi pemimpin untuk menjamin keberlangsungan hidup masyarakat. Kualitas kepemimpinan yang dibutuhkan adalah kepemimpinan yang dinamis dengan kemampuan untuk mengelola berbagai elemen secara terintegrasi di tengah perubahan yang terus-menerus melalui strategi yang jelas, manajemen yang cerdas, belajar terus-menerus, dan mencari jalan yang adaptif dan relevan, serta eksekusi kebijakan yang efektif. Secara sistematis membangun kapabilitas semua orang yang terlibat dan juga proses untuk menjamin bahwa ide-ide baru yang inovatif terakomodasi

dalam kebijakan, proyek dan program yang realistis , serta secara konsisten mengkoordinasikan seluruh aktivitas organisasi untuk mengarah pada pencapaian tujuan (Neo & Chen, 2007, p. 30).

Pada intinya, *dynamic governance* terjadi manakala “*policy-makers constantly think ahead to perceive changes in the environment, think again to reflect on what they are currently doing, and think across to learn from others, and continually incorporate the new perceptions, reflections and knowledge into their beliefs, rules, policies and structures to enable them to adapt to environmental change.*”(Neo & Chen, 2007, p. 15) Kapabilitas dinamis inilah yang menjadi kunci rahasia keberhasilan Singapura selama lebih dari empat dekade. *Dynamic governance* bisa terwujud secara berkelanjutan ketika “*there is a long-term commitment to and investments in building each of the elements in the system and designing the necessary linkages for them to work as a whole.*” Perlu digarisbawahi pula bahwa “[t]he interdependent, interacting and reinforcing flows” merupakan detak jantung dari *dynamic governance*. Tanpa itu, tidak akan pernah ada *dynamic governance*.

## **KESIMPULAN**

Pemerintahan yang dinamis (*dynamic governance*) menjadi sebuah kapabilitas yang strategis yang perlu dimiliki oleh Pemerintah di berbagai Negara di dunia saat ini. Perubahan berbagai sektor dan aspek kehidupan pada akhirnya melahirkan berbagai tuntutan kepada pemerintah untuk dapat meresponnya secara lebih efektif dan efisien. *Dynamic governance* menjadi landasan penting dalam proses perumusan dan implementasi kebijakan Pemerintah yang adaptif dan responsive terhadap perubahan lingkungan. Kemampuan ini menjadi faktor esensial dalam konteks upaya Pemerintah mewujudkan pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

Bhatta, G. (2005). *International dictionary of public management and governance*. Armonk, N.Y: M.E. Sharpe.

- Chhotray, V., & Stoker, G. (2009). *Governance Theory and Practice*. London: Palgrave Macmillan UK. <https://doi.org/10.1057/9780230583344>
- Neo, B. S. (2019). Dynamic Governance. Retrieved from [http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1121703274255/1439264-1242337549970/Dynamic\\_Governance.pdf](http://siteresources.worldbank.org/EDUCATION/Resources/278200-1121703274255/1439264-1242337549970/Dynamic_Governance.pdf)
- Neo, B. S., & Chen, G. (2007). *Dynamic governance: embedding culture, capabilities and change in Singapore*. New Jersey: World Scientific.
- Rahmatunnisa, M. (2010). Analisa Kritis Atas Good Governance. *JIPSI: Jurnal Ilmiah Ilmu Politik Dan Komunikasi*, 2(1), 1–13.